

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari segi kepentingan kelompok sasaran, implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender yang mana ditujukan kepada kelompok yang tertinggal, yang mana isi dari kebijakan sendiri sudah mencerminkan kepentingan dari kelompok sasaran yang memang membutuhkan sebuah pemahaman akan kesetaraan gender. Kemudian hal tersebut yang menjadi dasar dan patokan pelaksanaan program ini. Sehingga dalam semua tahapan, para siswa yang menjadi perhatian utama.
2. Dari segi manfaat, belum terlihat manfaat yang signifikan khusus untuk siswa laki-laki karena hanya memfokuskan peningkatan partisipasi perempuan. Dan jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini tidak sesuai dengan jawaban atau hasil wawancara yang didapat.
3. Dari segi perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan pengarusutamaan gender, Terdapat perbedaan konteks penelitian ini dengan informasi yang didapat dari hasil wawancara terhadap Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo. Jika dilihat, identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu terdapat ketimpangan gender antara laki-laki dengan perempuan dengan kasus lebih banyaknya angka putus sekolah yaitu pada siswa laki-laki. Lain halnya dengan informasi yang didapat dari Balai Dikmen bahwa perubahan

yang diharapkan dari implementasi kebijakan PUG yaitu lebih fokus untuk memberdayakan perempuan.

4. Dilihat dari segi letak pengambil keputusan, posisi pokja dalam struktur ini sangat lemah untuk dapat membuat suatu pembuatan keputusan berkaitan dengan gender sehingga sesuatu yang penting tidak bisa dibuatkan keputusan dengan sesegera mungkin, karena membutuhkan pertimbangan secara berjenjang ke atas, dan hal ini bisa berarti membutuhkan waktu yang cukup lama.
5. Dilihat dari segi aktor pelaksana dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang Pendidikan di tingkatan satuan pendidikan salah satunya adalah lembaga pendidikan formal sesuai dengan studi kasus dalam penelitian ini yaitu Sekolah Menengah Atas, diantaranya yaitu kepala sekolah, guru beserta jajarannya serta bekerja sama dengan komite sekolah, lalu sasaran utama yaitu siswa.
6. Dilihat dari segi sumber daya, ketersediaan staf sebagai sumberdaya untuk mengimplementasikan PUG di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo masih kurang. Kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, keanggotaan Pokja PUG juga dinilai belum mampu memberikan perubahan secara berarti.

B. Saran

1. Perlunya komitmen bagi pemerintah untuk melakukan penganggaran khusus untuk PUG di bidang pendidikan dari dana APBD Kabupaten Kulon Progo, dengan adanya anggaran khusus PUG di bidang pendidikan maka secara tidak langsung hal ini akan diikuti oleh lembaga di bawahnya yaitu satuan-satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini pun sangat mendukung dari adanya kebijakan PUG bidang pendidikan responsif gender.
2. Perlunya beragam bentuk kegiatan pengimplementasi PUG seperti advokasi, sosialisasi, pelatihan, seminar agar terciptanya keberhasilan dalam implementasi kebijakan PUG untuk seluruh jajaran. Tujuannya adalah untuk membangun sumber daya manusia yang mengerti dan paham akan gender. Bentuk kegiatan bukan semata-mata ditujukan hanya kepada pihak-pihak atasan seperti pejabat, para pegawai, namun sebaiknya juga melibatkan masyarakat di kalangan bawah, tokoh agama, dan para stakeholder yang lain supaya peran-peran mereka dalam PUG lebih maksimal dan lebih paham akan gender.
3. Perlunya penguatan Tim Pokja Pengarusutamaan Gender guna meminimalisir angka putus sekolah pada siswa laki-laki tingkat SMA dan menciptakan lembaga dan masyarakat yang responsive gender. Semua aktor yang terlibat dalam Tim Pokja PUG harus mempunyai persamaan persepsi bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) sangat penting sehingga

pelaksanaannya bisa berhasil. PUG sendiri pun dilaksanakan oleh Pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.